

# Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung

Ayu Purnamawati

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Universitas Lampung

---

**Abstrak** : Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se Propinsi Lampung tahun 2012 - 2016. Teknik analisis data menggunakan metode SEM dengan program AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan antara pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Lampung dengan pemerintah pusat merupakan hubungan instruktif. Kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

**Key words:** Kinerja Keuangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan

barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip

*value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai (Sularso dan Restianto, 2011).

Todaro (2003:92) menyampaikan ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Untuk dapat meningkatkan kemampuan investasi maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah seperti derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (AH Prihastuti, *et.al*, 2015). Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

## **TINJAUAN PUSTAKA, MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

### **Kinerja Keuangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah menyebutkan bahwa laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian

Negara/Lembaga yang bersangkutan. Dalam organisasi pemerintah terdapat beberapa ukuran kinerja yaitu, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, dan pertumbuhan.

#### a. Derajat Desentralisasi

Mahmudi (2010:142) mengatakan bahwa Derajat desentralisasi adalah perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

#### b. Ketergantungan Keuangan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan caramembandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi.

#### c. Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

#### d. Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Sesuai dengan Undang - undang No.32 tahun 2004, yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Melalui APBD arah, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah yang akan dan sedang dikerjakan dapat diketahui.

Menurut UU no. 33 tahun 2004 Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya belanja terdiri dari dua jenis belanja, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja modal dianggarkan setiap tahun dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk kualitas pelayanan publik.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan (Kuncoro, 2004).

### **Teori Ekonomi Neo Klasik**

Menurut teori ekonomi neo klasik Sollow - Swan, faktor - faktor yang berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, tenaga kerja dan tingkat kemajuan teknologi. Pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menurut model Sollow - Swan dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan

kerja, dan perkembangan teknologi berinteraksi dalam perekonomian menuju pertumbuhan ekonomi.

### Teori Keynes

John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan teori ekonomi makro modern (*The General Theory of Employment Interest and Money*). Teori Keynes berfokus pada permintaan agregat efektif di dalam negeri yang membentuk pengeluaran untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang akan menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Menurut Keynes pemerintah dapat menstimulus ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal.

Teori Keynes melihat hubungan antara kecenderungan pengeluaran pemerintah daerah (dalam hal ini belanja modal pemerintah) dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat apakah jika alokasi belanja modal suatu daerah semakin besar maka akan semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

### Teori Penganggaran

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkret dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich dalam Abdullah, 2004). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk

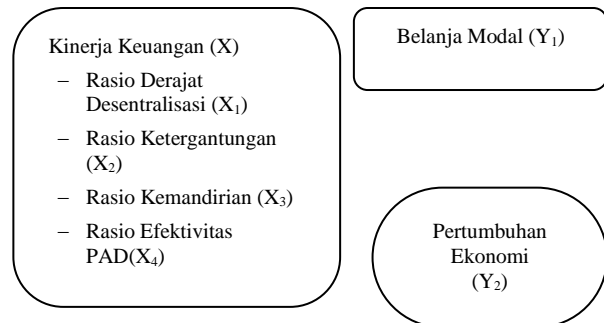
pengalokasian sumber daya (Rubin dalam Abdullah, 2004).

### Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Model Penelitian

Model penelitian merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris, secara sederhana model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



### Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mengetahui apakah alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi; hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H1:** Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

**H2:** Kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

**H<sub>3</sub>:** Alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## METODOLOGI

### Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.

### Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2012 - 2016;
- b. Memiliki data PDRB yang lengkap selama 2012 - 2016.

Kabupaten Pesisir Barat tidak masuk sebagai sampel penelitian karena tidak memenuhi kriteria sampel.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung yang berasal dari LHP BPK Propinsi Lampung.
- b. Data PDRB yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh

dari data statistik, laporan atau referensi yang tersedia, diolah dan dianalisis dengan menggunakan alat dan metode statistik yang sesuai.

### Variabel Penelitian

Berdasarkan teori dan hipotesis penelitian, maka variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2008:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kinerja keuangan yang yang tercermin oleh rasio :
  1. Derajat desentralisasi;
  2. Ketergantungan keuangan;
  3. Kemandirian keuangan; dan
  4. Efektivitas PAD.
- b. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

### Metode Analisis Data

Bentuk pengaruh dalam penelitian ini menggunakan variabel yang berperan ganda. Dimana variabel independen (eksogen) pada suatu kasus, namun menjadi variabel dependen (endogen) pada kasus lain. Bentuk pengaruh seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara simultan pengaruh tersebut. Metode yang digunakan adalah metode multivariat *Standard Equation Model* (SEM) dengan menggunakan program *Analysis of Momnet Structure* (AMOS).

## PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data dalam penelitian ini, meliputi nilai rata-rata (mean), simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum dari suatu distribusi data.

**Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif**

	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Alokasi Belanja Modal	0,235	0,114	0,382	0,060
Pertumbuhan Ekonomi	0,058	0,029	0,092	0,009
Rasio Derajat Desentralisasi	0,063	0,011	0,235	0,053
Rasio Ketergantungan	0,840	0,099	0,968	0,202
Rasio Kemandirian	0,092	0,012	0,433	0,095
Rasio Efektivitas PAD	1,007	0,517	1,882	0,225
Jumlah Observasi	70			

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, dapat dijelaskan hasil statistik deskriptif sebagai berikut :

- Alokasi belanja modal dengan nilai terkecil adalah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2016 sebesar 0,114, sedangkan nilai tertinggi adalah pada Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2015 sebesar 0,382. Nilai standar deviasi 0,060, yang berarti terjadi penyimpangan nilai alokasi belanja modal yang diteliti terhadap nilai rata - rata sebesar 0,060.
- Pertumbuhan ekonomi dengan nilai terkecil adalah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2014 sebesar 0,029, sedangkan nilai maksimum

adalah Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2012 sebesar 0,092. Nilai standar deviasi untuk pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,009 yang berarti terjadi penyimpangan nilai pertumbuhan ekonomi yang diteliti terhadap nilai rata - rata sebesar 0,009.

- Rasio Derajat Desentralisasi dengan nilai terkecil adalah Kabupaten Tulang Barat pada Tahun 2012 sebesar 0,011, sedangkan nilai tertinggi adalah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2016 sebesar 0,235. Nilai standar deviasi sebesar 0,053 yang berarti terjadi penyimpangan nilai rasio Derajat Desentralisasi yang diteliti terhadap nilai rata - rata 0,053.
- Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dengan nilai terkecil adalah Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2012 sebesar 0,099, sedangkan nilai tertinggi adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0,968 pada Tahun 2014. Nilai standar deviasi 0,202, yang berarti terjadi penyimpangan nilai rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang diteliti terhadap nilai rata - rata sebesar 0,202.
- Rasio Kemandirian Daerah pemerintah daerah dengan nilai terkecil adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2012 sebesar 0,012. Sedangkan nilai tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2016 sebesar 0,433. Nilai standar deviasi sebesar 0,095, yang berarti terjadi penyimpangan nilai Rasio

Kemandirian Daerah yang diteliti terhadap nilai rata - rata sebesar 0,095.

- f. Rasio Efektivitas PAD dengan nilai terkecil adalah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015 sebesar 0,517, sedangkan nilai tertinggi adalah Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2012 sebesar 1,882. Nilai standar deviasi 0,225, yang berarti terjadi penyimpangan nilai Rasio Efektivitas PAD yang diteliti terhadap nilai rata - rata sebesar 0,225.

### Uji Prasyarat Data

Asumsi normalitas data adalah pengujian untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal (Ghazali;226). Dengan menggunakan kriteria nilai kritis (*critical value*) skewness value sebesar  $\pm 2,58$  pada tingkat signifikansi 0,10. Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Setelah melakukan transformasi, untuk mendapatkan normalitas data langkah screening berikutnya yang harus dilakukan adalah mendeteksi adanya outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi.

### Pengujian Hipotesis

#### Kinerja Keuangan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- a. Koefisien regresi Rasio Derajat Desentralisasi ( $\beta_6 = -1,306$ ) jalur ini

bertanda negatif dan signifikan dengan  $p\text{-value} < 0,10$ . Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio derajat desentralisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

- b. Koefisien Rasio Ketergantungan Keuangan ( $\beta_7 = 0,005$ ) jalur ini bertanda positif namun tidak signifikan baik pada tingkat signifikansi 1%, 5%, maupun 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Rasio Kemandirian Daerah memiliki koefisien ( $\beta_8 = 1,253$ ) jalur ini bertanda positif dan signifikan dengan  $p\text{-value} < 0,10$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio kemandirian daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
- d. Koefisien Rasio Efektivitas PAD ( $\beta_9 = 0,112$ ) jalur ini bertanda positif dan signifikan dengan  $p\text{-value} < 0,001$ . Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan Rasio Efektivitas PAD berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain  $H_1$  terdukung.

## **Kinerja Keuangan Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Hipotesis kedua yang diuji adalah untuk melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian menunjukkan :

- a. Koefisien regresi Rasio Derajat Desentralisasi ( $\beta_1 = -0,734$ ) jalur ini bertanda negatif dan signifikan dengan  $p\text{-value} < 0,05$ . Dengan demikian, bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
- b. Koefisien Rasio Ketergantungan Keuangan ( $\beta_2 = 0,24$ ) jalur ini bertanda positif namun tidak signifikan baik pada tingkat signifikansi 1%, 5%, maupun 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal.
- c. Koefisien Rasio Kemandirian Daerah adalah ( $\beta_3 = 0,675$ ) jalur ini bertanda positif dan signifikan dengan  $p\text{-value} < 0,10$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio kemandirian daerah berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal didukung, sehingga makin tinggi Rasio Kemandirian Daerah maka alokasi belanja modal akan semakin tinggi
- d. Koefisien Rasio Efektivitas PAD ( $\beta_4 = 0,021$ ) jalur ini bertanda positif dan signifikan dengan  $p\text{-value} < 0,10$ . Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan

yang diproksikan dengan Rasio Efektivitas PAD berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, kecuali pada variabel rasio ketergantungan keuangan dengan kata lain  $H_2$  terdukung.

## **Alokasi Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hipotesis ketiga yang diuji adalah untuk melihat pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menyatakan bahwa jalur antara alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien ( $\beta_5 = -0,832$ ) dengan C.R sebesar  $-2,622$ , jalur ini bertanda negatif dan signifikan dengan  $p\text{-value} < 0,05$ , maka secara statistik variabel alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain alokasi belanja modal memiliki berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  tidak terdukung.

## **Pembahasan**

### **Kinerja Keuangan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa pola hubungan antara pemerintah daerah kabupaten/kota propinsi Lampung dan pemerintah pusat merupakan pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah (daerah tidak mampu



melaksanakan otonomi daerah) (Halim, 2004:188). Diharapkan pemerintah kabupaten/kota Propinsi Lampung dapat membuat suatu kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah seperti misalnya mempermudah regulasi investasi pihak luar atau meningkatkan potensi wisata dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

### **Kinerja Keuangan Melalui Alokasi Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja keuangan melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Sularso (2011) dan Arsa (2015) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan melalui alokasi belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. hal ini dapat disebabkan meskipun tingkat efektivitas PAD tinggi namun tidak selalu diimbangi dengan alokasi belanja modal yang tinggi sehingga walaupun berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun hal tersebut bukanlah di sebabkan oleh alokasi belanja modal.

### **Kinerja Keuangan Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan uji hipotesis atas pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal diketahui bahwa dalam penelitian ini kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas PAD. Secara umum penelitian ini sejalan dengan Arsa (2015)

pada kabupaten/ Kota Propinsi Bali 2006 – 2013.

### **Alokasi Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini berarti bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota Propinsi Lampung 2012 – 2016 belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota Lampung telah banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun belum mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Propinsi Lampung masih sangat bergantung pada pemerintah pusat terutama bantuan keuangan sebagai sumber pendapatan. Pemerintah daerah kabupaten/kota Propinsi Lampung harus mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi – potensi pendapatan agar dapat lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu pemerintah daerah kabupaten/kota Propinsi Lampung juga harus jeli dan cermat dalam pengalokasian belanja agar sesuai dengan kebutuhan, preferensi masyarakat, kondisi wilayah, dan untuk kegiatan yang produktif agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

## PENUTUP

### Simpulan

- a. Kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pola hubungan antara pemerintah daerah kabupaten/kota propinsi Lampung merupakan pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) (Halim, 2004:188).
- b. Kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota Propinsi Lampung masih sangat rendah dan bergantung pada pemerintah pusat.
- c. Alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menggunakan data alokasi belanja modal secara keseluruhan termasuk di dalamnya belanja modal untuk pembangunan gedung perkantoran dan sekolah sekolah yang tentunya tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kualitas pembangunan infrastruktur yang belum sesuai standard dan alokasi

wilayah pembangunan yang belum merata juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Saran

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Lampung, antara lain:

- a. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung diharapkan agar mampu meningkatkan kinerja keuangan dan mengembangkan potensi – potensi dan sektor ekonomi daerah yang dapat meningkatkan PAD sehingga tidak selalu bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan dapat lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya.
- b. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung diharapkan lebih banyak menggunakan PAD untuk alokasi belanja modal dan meminimalisir alokasi belanja rutin yang tidak perlu.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih perlu untuk disempurnakan. sebagai berikut:

- a. Penelitian ini baru menggunakan data laporan keuangan selama (5) lima tahun terakhir, dan belum menggunakan metode wawancara atau kuesioner untuk mengetahui kendala – kendala dalam pencapaian kinerja yang baik.
- b. Penelitian ini juga baru menggunakan empat rasio kinerja keuangan dari keseluruhan rasio kinerja keuangan. Dampak belanja modal terhadap

pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda dalam berbagai penelitian.

- c. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan indikator kinerja keuangan dan memperluas lokasi penelitian serta menambah periode dan metode penelitian.

#### DAFTAR PUSTKA

- Alexiou, Constantinos. (2009). *Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE)*. *Journal of Economic and Social Research*. 11. 1-16
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener and Tina Søreide. (2001). *Corruption: A review of contemporary research*. Chr. Michelsen Institute *Development Studies and Human Rights Report R 2001*:
- AH Prihastuti, et. al.( 2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau*. *Jurnal Sorot*, Vol. 10 No 2 : 143 – 154. LPPM Universitas Riau. ISSN : 1907-364X
- Arsa, Ketut dan Nyoman Djinar Setiawina. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013.*. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol.20 No.2: 104-112
- Adi, P. H. .2007. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol 08. No. 1.
- BPKP, 2012. *Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Revisi)*.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2016*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- \_\_\_\_\_. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2015*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- \_\_\_\_\_. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2014*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- \_\_\_\_\_. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2013*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- \_\_\_\_\_. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2012*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung*. Lampung: Badan Pusat Statistik.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.
- Fahd, Yanuar & Rasyid, Syarifuddin. 2017. *Jurnal Analisis Vol. 6 No. 2. Pengaruh Kinerja Keuangan*

- Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya Pada Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M. L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kawa, Erlangga Pati 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pelaksanaan Undang - Undang Otonomi Daerah di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret
- Lin, J. Y, dan Liu, Z. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth ni China, Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49.
- Lane. Jan Erik 2000. *The Public Sector - Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh)*. *Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-0164, Vol. 2, No. 2, p. 80-90. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moe, T.M. (1984) *The New Economics of Organization*. *American Journal of Political Science*, 28, 737-777
- Normala Sari, Greydi et al (2015) *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 - 2014*. Universitas Sam Ratulangi
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- . 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- . 2014. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 (2):109-124
- Samuelson, P.A, dan Nordhaus, W, D. (2004) *Ilmu Makroekonomi*. Edisi XVII. alih bahasa Gretta dkk. Jakarta: PT Media Global Edukasi
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 8. alih bahasa Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Utama, S. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar : Sastra